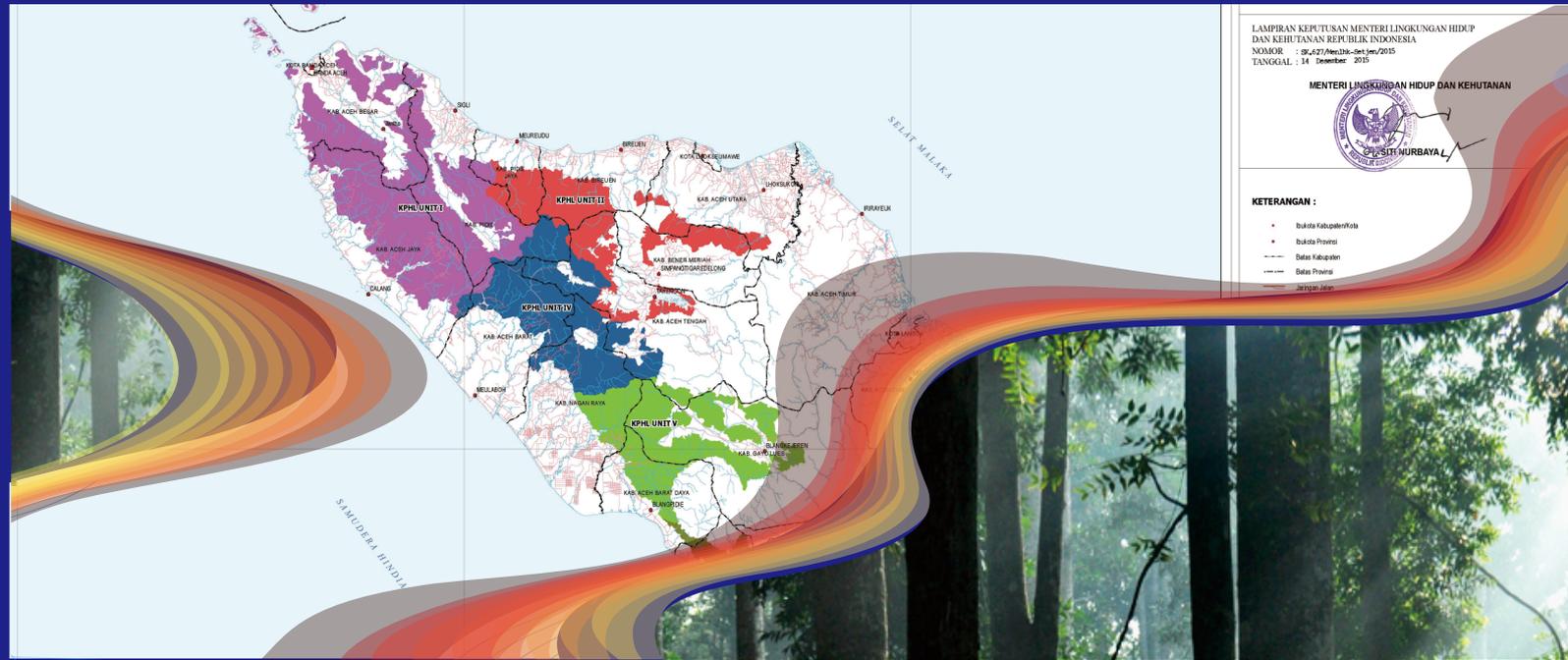




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN



RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
TAHUN 2015 - 2019



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Telepon : (021) 5730335 – 5730292 Fak : (021) 5730335
Jakarta 10270

PERATURAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Nomor : P.1/IPSDH/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
TAHUN 2015-2019

DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Strategis Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan....

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MenLHK/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2013;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.173//Menlhk-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan dalam :

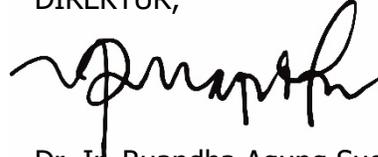
1. Penyusunan...

1. Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2. Penyusunan Anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, Desember 2015
DIREKTUR,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

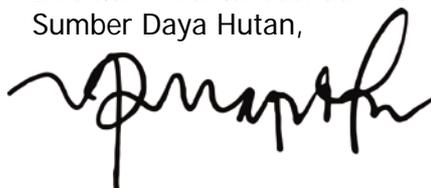
Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2019 memuat garis besar gambaran umum, sasaran dan langkah-langkah pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selama 5 (lima) tahun ke depan, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan menjadi bagian dalam mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan hingga tahun 2019.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi	4
C. Capaian Sampai Dengan Tahun 2014 (Periode Renstra Tahun 2010-2014)	5
D. Potensi dan Tantangan	7
E. Kondisi yang diinginkan	8
F. Sistematika	8
BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN KEGIATAN.....	9
A. Arah Kebijakan.....	9
B. Sasaran Kegiatan.....	9
BAB III SASARAN DAN KINERJA UNIT KEGIATAN.....	11
A. Sasaran Unit Kegiatan	11
B. Indikator Kinerja.....	11
BAB IV KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN.....	17
A. Kerangka Regulasi.....	17
B. Kerangka Pendanaan.....	17
BAB V PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Tugas Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Adapun fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah menyelenggarakan:

- a) penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- c) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- e) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- f) supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
- g) pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri dari 4 (Empat) Sub Direktorat dan 1 (Satu) Sub Bagian, yaitu :

1. **Sub Direktorat Inventarisasi Hutan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Inventarisasi Hutan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca Sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan; (b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan; (c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria nventarisasi hutan tingkat wilayah; (d) supervisi atas

urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan (e) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Sub Direktorat Inventarisasi Hutan terdiri atas:

- a. *Seksi Inventarisasi Nasional*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional.
 - b. *Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan
2. **Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan sumber daya hutan; (b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan sumber daya hutan; (c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sumber daya hutan; (d) supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan (e) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan.

Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. *Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah;
 - b. *Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.
3. **Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; (b)

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; (c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan (e) supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.

Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan terdiri atas:

- a. *Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan tematik kehutanan.
- b. *Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dokumentasi tematik kehutanan.

4. **Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang jaringan data spasial kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan data spasial kehutanan; (b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaringan data spasial kehutanan; (c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaringan data spasial kehutanan; (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis jaringan data spasial kehutanan; dan (e) supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.

Sub Direktorat Jaringan Data Spasial terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

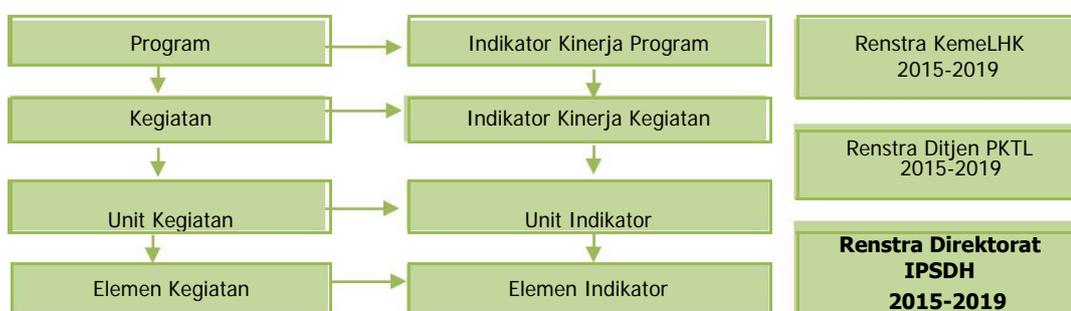
5. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan memuat langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran kegiatan guna mendukung dan memastikan tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rencana Strategis

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran sampai dengan tahun 2019.

B. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.40/Menlhk-Setjen/2015, Renstra di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain terdiri atas Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I, Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis. Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis berada pada tingkatan yang sama di bawah Renstra Unit Kerja Eselon I, karena keduanya memiliki posisi yang sama sebagai penanggung jawab kegiatan. Kedudukan Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kedudukan Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH

Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan ini adalah :

1. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana tugas dan fungsi di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.173/MenLHK-II/2015 dapat dilihat pada Gambar Nomor 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan

2. Jumlah pegawai (PNS) di lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berjumlah 72 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat IPSDH Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Unit Kerja	Tahun 2015										
	Golongan (orang)				Tingkat Pendidikan (orang)						
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9	53	10	-	2	18	26	4	21	-	1

Tabel 2. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat IPSDH Berdasarkan Jabatan Fungsional Sampai Tahun 2015

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah (orang)	Σ(Jumlah)
Pengendali Ekosistem Hutan		
Terampil	4	10
Calon Terampil	0	
Ahli	5	
Calon Ahli	1	
Surveyor Pemetaan		
Ahli	1	2
Terampil	1	

3. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
4. Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan ini menjadi bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dan menjadi salah satu instrumen dalam pencapaiannya.

C. Capaian Sampai Dengan Tahun 2014 (Periode Renstra Tahun 2010-2014)

Hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sampai dengan akhir tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010-2014

Unit Kegiatan	Output	Target 2010 - 2014	Realisasi 2010 - 2014	Persentase
Pembuatan Peta Tematik Kehutanan (Digital)	Buku Analisis Dinamika Deforestasi Indonesia	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	5 Judul	5 Judul	100%
	Buku Atlas Hutan Indonesia	5 Judul	5 Judul	100%
	Peta Areal Indikatif Penundaan	5 Judul	5 Judul	100%
	Penundaan Pemberian Ijin Baru Hutan Alam primer dan Lahan Gambut	5 Judul	5 Judul	100%
Dokumentasi Data Pelayanan dan Dokumentasi Peta	Dokumentasi Data dan Peta Kehutanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Pengolahan dan Analisa Data Potensi SDH berdasarkan Data Hasil Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Uji Petik Pelaksanaan Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Bimbingan Teknis Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pengolahan Data Hasil Inventarisasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Pemantauan Sumber Daya Hutan Tk. Unit Pengelolaan	Pemantauan Penutupan Hutan Secara Periodik melalui Pemanfaatan Citra Resolusi Sedang	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penghitungan Serapan dan Emisi Karbon (dalam rangka MRV)	5 Judul	5 Judul	100%
	Pemantauan Data Titik Panas (Hotspot)	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penutupan Lahan pada Kawasan Unit Pengelolaan dengan Teknologi Penginderaan Jauh	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan Lahan pada Areal IUPHHK-HA/HT	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Telaah Penutupan Lahan Pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Pembangunan Sistem Integrasi Jaringan Komunikasi Data Spasial Kehutanan Pusat dan Daerah	Penyempurnaan Pengelolaan Basis Data Spasial Kehutanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Inhouse Training Penyusunan Metadata	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Spasial	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Administrasi Kegiatan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Operasional Perkantoran	5 Laporan	5 Laporan	100%

D. Potensi dan Tantangan

1. Potensi

Potensi yang dimiliki Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan dalam pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2019, adalah adanya sumber daya manusia yang cukup dan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai.

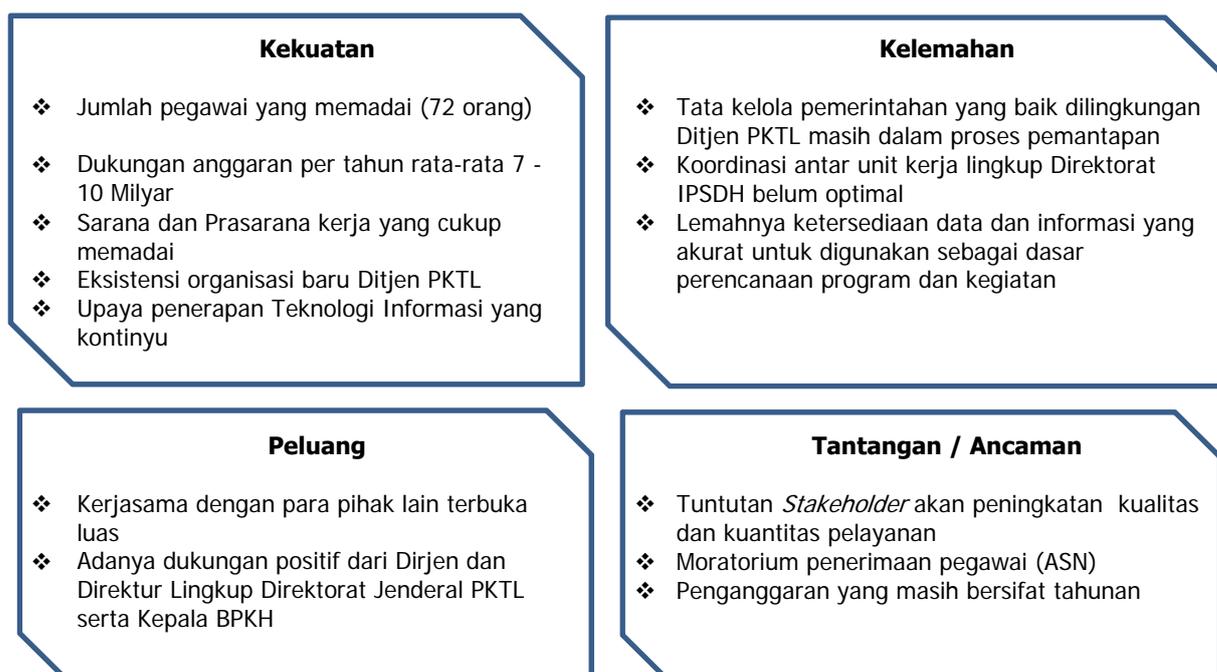
2. Tantangan dan Permasalahan

Dibalik potensi-potensi yang dimiliki oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan kurun waktu 2010-2014.

Permasalahan yang dimaksud, antara lain:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.
2. Koordinasi antar unit kerja lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan belum berjalan secara optimal.
3. Masih lemahnya sistem data dan informasi sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan.

Selain tantangan dan permasalahan tersebut di atas, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sebagai komponen dari pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

E. Kondisi yang diinginkan

Kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 adalah terselenggaranya dan terjaminnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berjalan yang efektif dan efisien guna, mendukung tercapainya Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, maka setidaknya kegiatan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan harus dapat mewujudkan antara lain :

- SDM yang berkompentensi tinggi dan berkinerja baik
- Anggaran yang optimal dan tepat sasaran
- Pemanfaatan kerjasama (pelibatan para pihak/mitra yang handal) dalam upaya pencapaian sasaran kinerja program .
- Kebijakan dan peraturan perundangan yang tertib dan berkualitas
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan mendukung peningkatan kinerja
- Laporan kegiatan dan laporan keuangan yang berkualitas

F. Sistematika

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 ini memuat :

1. Kata Pengantar;
2. Pendahuluan;
3. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan;
4. Sasaran dan Kinerja Unit Kegiatan;
5. Kerangka Regulasi dan Pendanaan;
6. Penutup.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019, bahwa sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah :

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual
2. Tersedianya data dan informasi SDH
3. Terkendalinya penggunaan kawasan hutan
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Pada prinsipnya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berperan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok yang diamanahkan kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Sasaran Kegiatan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan telah ditetapkan kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yaitu "Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang terbaharui " dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang ter-update per tahun

Pada Hakikatnya, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang ter-update per tahun ditetapkan untuk mendukung penetapan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan, serta kebijakan dan kerjasama di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan Dukungan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang baik diharapkan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan dapat dicapai agar mampu menghadapi tantangan kedepan.

BAB III SASARAN DAN KINERJA UNIT KEGIATAN

A. Sasaran Unit Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran kegiatan **Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang terbaru di seluruh KPH** dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) unit kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. **Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH** dengan sasaran terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi, Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumber Daya Hutan, serta *Inhouse Training* Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
2. **Penyusunan Peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan** dengan sasaran tersusunnya Dokumen Peraturan di Bidang Inventarisasi Hutan, Pemantauan Sumber Daya Hutan, Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan, serta Jaringan Data Spasial.
3. **Penyediaan Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH** dengan sasaran tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional, Data dan Informasi Potensi SDH KPH/Unit Pengelolaan, tersusunnya Neraca Sumber Daya Hutan Nasional, serta terbitnya Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta tersedianya Peta NSDH dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta.
4. **Terselenggaranya Penyiapan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH** dengan sasaran terselenggaranya Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh, Pemantauan Sumber Daya Hutan, tersedianya Dokumen Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang, Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan Lahan pada Areal Unit IUPHHK-HA/HT, terselenggaranya Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan, Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan, Penelaahan Peta Tematik Kehutanan, Penghitungan Deforestasi Indonesia, Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia, serta tersedianya Sistem Informasi Spasial Sumber Daya Hutan.

Sedangkan untuk Sasaran kegiatan **Regulasi Satu Peta di lingkungan Kementerian** dijabarkan lebih lanjut dalam unit Kegiatan **Penyusunan/Penyempurnaan Regulasi Satu Peta di lingkungan Kementerian LHK** dengan sasaran Penyusunan/Penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta dan Migrasi Peta Tematik Kehutanan.

B. Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan menetapkan langkah-langkah strategis di setiap kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap

pencapaian tujuan, sasaran dan program planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin). Secara lengkap indikator kinerja kegiatan tersebut dijabarkan dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2015-2019

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Dokumen Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi
			Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumber Daya Hutan
			Inhouse Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Inhouse Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inhouse Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
			Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Uji Petik Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Penyusunan Peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersusunnya Peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Dokumen Peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyusunan Peraturan di Bidang Inventarisasi SDH	Tersusunnya Peraturan di Bidang Inventarisasi SDH	Dokumen Peraturan di Bidang Inventarisasi SDH
			Penyusunan Peraturan di Bidang Pemantauan SDH	Tersusunnya Peraturan di Bidang Pemantauan SDH	Dokumen Peraturan di Bidang Pemantauan SDH
			Penyusunan Peraturan di Bidang Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan	Tersusunnya Peraturan di Bidang Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan	Peraturan di Bidang Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
Penyediaan Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Tersedianya Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Dokumen Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional	Dokumen Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional
			Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH/Unit Pengelolaan	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH/Unit Pengelolaan	Dokumen Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH/Unit Pengelolaan
			Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional	Tersusunnya Neraca Sumber Daya Hutan Nasional	Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan Nasional
			Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Terselenggaranya Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Peta Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
			Pembuatan Peta NSDH dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta	Tersedianya Peta NSDH dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta	Peta NSDH dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta
Penyiapan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Terselenggaranya Penyiapan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	Terselenggaranya Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	Laporan Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh
			Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Hutan	Buku Pemantauan Sumber Daya Hutan
			Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang	Terselenggaranya Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang	Dokumen Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
			Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan Lahan pada Areal Unit IUPHHK-HA/HT	Terselenggaranya Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan Lahan pada Areal Unit IUPHHK-HA/HT	Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan Lahan pada Areal Unit IUPHHK-HA/HT
			Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan	Tersedianya Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan	Buku Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan
			Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terselenggaranya Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan	Laporan Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan
			Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	Terselenggaranya Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	Dokumen Telaahan Peta Tematik Kehutanan
			Penghitungan Deforestasi Indonesia	Terselenggaranya Penghitungan Data Deforestasi Indonesia	Buku Deforestasi Indonesia
			Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	Terselenggaranya Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia
			Penyediaan Sistem Informasi Spasial Sumber Daya Hutan	Tersedianya Sistem Informasi Spasial Sumber Daya Hutan	Sistem Informasi Spasial SDH
Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi Satu Peta di lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Draft Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian	Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu peta	Tersusunnya Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu peta	Regulasi Satu Peta di lingkungan Kementerian

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKU)	Elemen Kegiatan	Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE)
			Migrasi Peta Tematik Kehutanan	Terselenggaranya Migrasi Peta Tematik Kehutanan	Peta Tematik Kehutanan yang telah di-migrasi
	Good Governance Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Terselenggaranya Good Governance Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Operasional Perkantoran	Dokumen Pelayanan Perkantoran
Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan			Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan			Terlaksananya Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Dokumen Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	

BAB IV KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam rangka mewujudkan pra kondisi pembangunan nasional terutama dalam bidang tata kelola kawasan hutan dan tata kelola lingkungan hidup.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi antara lain adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan kerangka regulasi dan pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas program planologi kehutanan dan tata lingkungan serta segera melaksanakan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

Pelaksanaan kegiatan akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan, penyediaan data dan informasi dasar potensi sumber daya hutan, penyiapan dan pengembangan sistem informasi sumber daya hutan nasional yang secara umum bertujuan untuk mendukung tata kelola KPH yang optimal, serta untuk mendukung implementasi kebijakan satu peta di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan disusun dengan asumsi adanya ketersediaan anggaran sekitar Rp.7 – 10 Milyar per tahun.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kemitraan dengan lembaga donor, dunia usaha, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan alternatif sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini merupakan instrumen dalam mencapai sasaran program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 yang diamanatkan di dalam lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Dengan demikian, Renstra ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan capaian akhir yang hendak dituju adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah (UPT), dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan Data dan Informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH dapat terwujud pada tahun 2019.

Untuk selanjutnya, Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) sebagai upaya untuk mengharmonisasikan antara kinerja yang diharapkan dengan input yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap bagian lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Dengan demikian, seluruh bagian diharapkan dapat mengambil peran dengan melaksanakan seluruh elemen kegiatan untuk mencapai elemen indikator yang telah digariskan di dalam Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini.

LAMPIRAN

		Regulasi Satu Peta Di lingkungan Kementerian	Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi Satu Peta di lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Draft Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian	Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu peta	Tersusunnya Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu peta	Regulasi Satu Peta di lingkungan Kementerian	-	1 judul	(1 judul)	(1 judul)	(1 judul)					
				Good Governance Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Terselenggaranya Good Governance Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Migrasi Peta Tematik Kehutanan Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Migrasi Peta Tematik Kehutanan Terselenggaranya Pelayanan Operasional Perkantoran	Peta Tematik Kehutanan yang telah di-migrasi Dokumen Pelayanan Perkantoran	-	1 judul	(1 judul)	(1 judul)	(1 judul)					
						Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Dokumen									
						Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1 Dokumen									
						Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Terlaksananya Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Dokumen Koordinasi kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Dokumen									

Keterangan : Tanda dalam kurung () menunjukan angka kumulatif

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2015-2019



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 7
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5730283, Email: Subditinven@gmail.com